

EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) UNTUK MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMANDAU

Ova Sarini^{1)*}, Aquarini²⁾, M. Fatchurahman³⁾

(e-mail: ovasarini.mmm@gmail.com¹⁾)

(*) Corresponding Author

^{1), 2), 3)} Magister Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

ABSTRACT

This study evaluates the effectiveness of the implementation of the Disaster-Resilient Village Program (DESTANA) in Lamandau Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and documentation from eight villages selected as research sites. The findings indicate that budget constraints, limited community training, and a lack of coordination among stakeholders are the primary challenges. Only half of the villages have conducted emergency response simulations, with low community participation. This study highlights the importance of equitable budget distribution, community engagement, and enhanced cross-sectoral coordination. The contribution of this research lies in strengthening community-based disaster risk reduction theory and providing strategic recommendations for more inclusive policies. It opens opportunities for further exploration of the social and cultural factors influencing community preparedness in facing disasters.

Keywords: Disaster-Resilient; Policy Implementation; Preparedness

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kabupaten Lamandau. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari delapan desa yang menjadi lokasi penelitian. Temuan menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar-pemangku kepentingan menjadi kendala utama. Hanya separuh desa yang telah melaksanakan simulasi tanggap darurat, dengan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini menyoroti pentingnya distribusi anggaran yang adil, pelibatan masyarakat, dan peningkatan koordinasi lintas sektor. Kontribusi penelitian terletak pada penguatan teori pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dan rekomendasi strategis untuk kebijakan yang lebih inklusif. Penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut tentang faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kesiapsiagaan; Tangguh Bencana

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Lamandau, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, memiliki potensi risiko bencana alam yang tinggi, termasuk banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Sebagai wilayah yang dikelilingi oleh hutan tropis dan aliran sungai besar, ancaman bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam upaya meminimalisasi dampak bencana, pemerintah memperkenalkan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang dirancang untuk

meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Namun, keberhasilan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan material, serta kurangnya pelatihan bagi aparat desa menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Dengan tantangan tersebut, muncul pertanyaan kritis: Sejauh mana program DESTANA dapat diimplementasikan secara efektif untuk

meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Lamandau?

Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sering mengalami bencana banjir yang signifikan, dengan kejadian terbaru pada September 2024 yang merendam beberapa desa di Kecamatan Belantikan Raya dan Lamandau akibat luapan Sungai Belantikan. Banjir ini berdampak pada puluhan rumah dan fasilitas umum, serta mengganggu akses jalan di wilayah tersebut. Sebelumnya, pada Juli 2020, sekitar 55 desa terendam, mempengaruhi lebih dari 5.900 warga dan menyebabkan ribuan orang mengungsi. Banjir di Lamandau dipicu oleh curah hujan tinggi dan faktor lingkungan seperti deforestasi yang mengurangi daya serap tanah (Dayak News, 2024; Kalteng Pos, 2024; Kompas.id, 2020).

Fakta-fakta ini selaras dengan literatur yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tanggap bencana sering kali menghadapi kendala dalam aspek koordinasi, sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) menyoroti bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, struktur organisasi, dan dukungan dari masyarakat lokal (Fauziyah & Arif, 2021; Lestari et al., 2024). Namun, literatur yang ada masih terbatas dalam memberikan jawaban spesifik tentang bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam konteks lokal seperti di Kabupaten Lamandau. Selain itu, literatur lain yang membahas tentang model kesiapsiagaan masyarakat dalam program berbasis komunitas menunjukkan bahwa keberhasilan program bergantung pada integrasi budaya lokal, tetapi penelitian ini belum secara mendalam mengkaji efektivitas program dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana di daerah terpencil (Sayuti et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan studi yang lebih mendalam untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengevaluasi efektivitas implementasi

program DESTANA di Kabupaten Lamandau; kedua, mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program; dan ketiga, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui program ini. Evaluasi ini tidak hanya akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana program telah berhasil diimplementasikan, tetapi juga membantu dalam perencanaan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi akademis sekaligus implikasi praktis untuk perbaikan kebijakan tanggap bencana di tingkat lokal.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi faktor utama dalam mitigasi risiko bencana. Tanpa kesiapan yang memadai, dampak bencana tidak hanya akan melibatkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Argumen ini diperkuat oleh fakta bahwa Kabupaten Lamandau memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana, tetapi implementasi DESTANA masih menghadapi kendala yang signifikan. Berdasarkan tujuan penelitian, studi ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata untuk mengatasi hambatan dalam implementasi program DESTANA. Lebih jauh lagi, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang mampu memperkuat ketangguhan masyarakat lokal di masa depan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik yang menentukan sejauh mana sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pelaksana untuk mengubah tujuan kebijakan menjadi hasil yang nyata. Definisi ini menekankan bahwa implementasi adalah proses dinamis yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan lingkungan sosial-politik. Dalam konteks

kebijakan tanggap bencana, implementasi mencakup aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran informasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk menghadapi risiko bencana. Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan secara efektif oleh aparat lokal dan diterima oleh masyarakat (Fauziah & Arif, 2021; Iskandar et al., 2018).

Manifestasi implementasi kebijakan dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu sumber daya, struktur organisasi, komunikasi, dan lingkungan eksternal. Pertama, sumber daya mencakup anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Kedua, struktur organisasi mengacu pada bagaimana kebijakan diorganisasikan, termasuk pembagian tanggung jawab di antara aktor-aktor yang terlibat. Ketiga, komunikasi merujuk pada mekanisme penyampaian informasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat. Keempat, lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Dalam konteks program DESTANA, keberhasilan implementasi bergantung pada sejauh mana dimensi-dimensi ini dapat dioptimalkan untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana (Juliswara et al., 2022a).

Desa Tangguh Bencana (DESTANA) adalah program nasional yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi ancaman bencana. Berdasarkan dokumen resmi BNPB, DESTANA didefinisikan sebagai desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi, menghadapi, dan pulih dari ancaman bencana. Program ini berorientasi pada pendekatan berbasis komunitas, di mana masyarakat desa dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan

kesiapsiagaan bencana. Konsep DESTANA bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan mandiri dalam mengelola risiko bencana (Yuliani et al., 2024).

Manifestasi program DESTANA mencakup tiga pilar utama, yaitu penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan infrastruktur pendukung, dan integrasi kebijakan lokal. Pilar pertama, penguatan kapasitas masyarakat, melibatkan pelatihan, simulasi bencana, dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pilar kedua, pengembangan infrastruktur pendukung, mencakup pembangunan sarana seperti tempat evakuasi, sistem peringatan dini, dan jalur evakuasi. Pilar ketiga, integrasi kebijakan lokal, memastikan bahwa program DESTANA disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik desa setempat. Dengan pilar-pilar ini, DESTANA diharapkan dapat meningkatkan resiliensi masyarakat desa terhadap berbagai ancaman bencana (Aqurini, 2020; Mahbubah et al., 2021).

Kesiapsiagaan masyarakat adalah kondisi di mana individu, keluarga, dan komunitas memiliki kemampuan untuk merespons situasi darurat dengan cepat dan efektif. Menurut (Wisner et al, 2004), kesiapsiagaan mencakup pengetahuan, sikap, dan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana. Definisi ini menekankan pentingnya kombinasi antara pemahaman teoretis dan praktik langsung dalam membangun kesiapan masyarakat. Dalam konteks program berbasis komunitas seperti DESTANA, kesiapsiagaan masyarakat mencakup partisipasi aktif dalam pengelolaan risiko bencana, termasuk mitigasi, respons darurat, dan pemulihan pasca-bencana (Ryan et al., 2020).

Manifestasi kesiapsiagaan masyarakat dapat dilihat melalui tiga dimensi utama: pengetahuan, perilaku, dan sumber daya. Dimensi pengetahuan mencakup pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis bencana, potensi risiko, dan langkah-langkah mitigasi. Dimensi perilaku mencakup partisipasi aktif

dalam kegiatan tanggap darurat seperti simulasi bencana dan pelatihan evakuasi. Dimensi sumber daya mencakup akses terhadap alat-alat tanggap bencana, seperti alat komunikasi darurat, peta risiko, dan peralatan pertolongan pertama. Dalam konteks Kabupaten Lamandau, manifestasi kesiapsiagaan masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi program DESTANA, sekaligus indikator penting dalam mengukur tingkat ketangguhan desa terhadap ancaman bencana (Permana & Rahman, 2023).

Penelitian ini menempatkan diri pada posisi yang melengkapi dan mengembangkan penelitian terdahulu mengenai implementasi program pengurangan risiko bencana di tingkat desa, khususnya dalam konteks Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak fokus pada aspek kebijakan dan struktur organisasi, penelitian ini menyoroti kendala praktis di lapangan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar-pemangku kepentingan. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali lebih dalam permasalahan di tingkat desa, serta memberikan rekomendasi strategis yang lebih praktis dan berbasis pada data lapangan, guna memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

II. METODE

Penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kabupaten Lamandau, dengan berbagai fenomena sebagai objek kajian. Beberapa masalah utama yang menjadi perhatian adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program DESTANA, keterbatasan sumber daya yang tersedia, kurangnya pelatihan dan kapasitas aparat desa, serta integrasi kebijakan lokal yang belum optimal. Selain itu, ketergantungan

desa-desa pada bantuan eksternal, tantangan sosial dan budaya, lemahnya koordinasi antar-*stakeholder*, minimnya data risiko bencana, kurangnya pemanfaatan teknologi, dan keterbatasan dalam pemantauan serta evaluasi juga menjadi isu yang relevan. Kajian mendalam terhadap berbagai permasalahan ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas implementasi program dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan terkait isu-isu seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pelatihan aparat desa. Data sekunder diambil dari literatur, laporan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan program DESTANA dan kesiapsiagaan bencana. Metode ini bertujuan untuk menggali perspektif mendalam dari berbagai pihak serta memahami kompleksitas fenomena dalam konteks kehidupan nyata, sehingga menghasilkan wawasan yang holistik dan komprehensif (Creswell, 2018).

Sumber informasi utama penelitian ini mencakup berbagai pihak yang memiliki keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam program DESTANA. Informan kunci terdiri atas Kepala BPBD Kabupaten Lamandau (1 orang), yang memberikan perspektif kebijakan dan pelaksanaan program di tingkat kabupaten, serta Kepala Bidang dan pemegang program DESTANA (1 orang), yang memberikan wawasan tentang strategi implementasi dan kendala teknis. Selain itu, masyarakat dari delapan desa (masing-masing lima orang per desa) juga menjadi partisipan penelitian. Desa-desa yang dipilih adalah Bunut, Sungai Mentawa, Kelurahan Nanga Bulik, Kujan, Batu Kotam, Kelurahan Tapin Bini, Samu Jaya, dan Nanga Belantikan, yang mewakili variasi kondisi geografis dan sosial di Kabupaten Lamandau.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan untuk menggali informasi tentang pengalaman, pandangan, dan kendala terkait program DESTANA. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas program, partisipasi masyarakat, serta kondisi fisik desa. Dokumentasi mencakup analisis dokumen-dokumen resmi, laporan, dan data pendukung lain yang relevan. Tahapan penelitian dimulai dari perencanaan, pengumpulan data di lapangan, hingga penyusunan temuan yang didasarkan pada analisis data.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi direduksi untuk menyaring informasi yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Verifikasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan dengan menerapkan teknik kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmabilitas. Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan dalam konteks studi kasus untuk memberikan kontribusi ilmiah dan rekomendasi praktis yang bermanfaat bagi pengembangan program DESTANA di masa mendatang.

III. PEMBAHASAN

Hasil Penelitian.

Teori Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (*Community-Based Disaster Risk Reduction Theory*) sering dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan yang menekankan partisipasi masyarakat lokal dalam pengurangan risiko bencana. Salah satu pelopor konsep ini adalah John Twigg, yang dalam bukunya "*Characteristics of a Disaster-Resilient Community*" (2009) menguraikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan bencana. Teori ini telah diadopsi dan dikembangkan

oleh berbagai organisasi internasional seperti UNISDR (*United Nations Office for Disaster Risk Reduction*) untuk mendukung pembangunan komunitas yang tangguh terhadap bencana ([John Twigg, 2009](#)).

Teori Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (*Community-Based Disaster Risk Reduction Theory*) menjadi landasan utama dalam memahami dan mengevaluasi implementasi program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kabupaten Lamandau. Teori ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengurangan risiko bencana melalui pendekatan yang partisipatif dan inklusif ([Paripurno et al., 2024](#)). Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, teori ini bertujuan untuk membangun kapasitas komunitas dalam menghadapi ancaman bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis komunitas juga menyoroti perlunya penguatan struktur sosial, distribusi informasi yang merata, dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai kesiapsiagaan yang optimal ([De Sisto et al., 2024](#); [Sunarto et al., 2024](#)).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kabupaten Lamandau menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan wawancara dengan Kepala BPBD, salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung pelatihan dan penyediaan peralatan tanggap darurat. Selain itu, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan memperlambat pelaksanaan program. Observasi di lapangan mengungkapkan bahwa sebagian besar desa belum memiliki fasilitas tanggap darurat yang memadai, seperti perahu karet, alat komunikasi, dan tempat evakuasi yang layak. Dokumentasi resmi menunjukkan bahwa alokasi anggaran program DESTANA bervariasi antara desa, dengan beberapa desa menerima dana lebih besar dibandingkan lainnya.

Data menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama implementasi kebijakan. Alokasi dana yang tidak merata di antara desa-desa menjadi tantangan yang mempersulit penyediaan fasilitas tanggap darurat secara optimal. Wawancara juga mencatat bahwa *monitoring* dan evaluasi program oleh pemegang program DESTANA masih kurang, sehingga sulit untuk memastikan efektivitas program. Observasi partisipasi masyarakat yang rendah dalam simulasi bencana menunjukkan adanya kekurangan dalam penyebaran informasi dan keterlibatan warga desa.

Keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi, serta minimnya fasilitas dan pelatihan di desa-desa menunjukkan kesenjangan antara tujuan kebijakan DESTANA dengan implementasi di lapangan. Masalah ini mengindikasikan bahwa kendala struktural, seperti koordinasi antar-*stakeholder* dan alokasi anggaran, perlu segera diatasi untuk memastikan efektivitas program. Realitas ini juga memperlihatkan bahwa kurang optimalnya pelaksanaan program berkontribusi pada rendahnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Program DESTANA, sebagai kebijakan strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, masih menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di delapan desa, sebagian besar warga belum mendapatkan pelatihan memadai tentang tanggap bencana. Observasi menunjukkan bahwa hanya empat desa dari delapan yang telah melaksanakan simulasi tanggap darurat dalam dua tahun terakhir. Dokumentasi resmi menegaskan bahwa sebagian besar program sosialisasi masih belum merata, dengan intensitas kegiatan yang berbeda di setiap desa.

Eksplanasi data memperlihatkan bahwa desa-desa yang mendapatkan pelatihan dan sosialisasi lebih intensif cenderung lebih siap menghadapi bencana dibandingkan desa lainnya. *Monitoring* dan evaluasi yang kurang

optimal juga berdampak pada rendahnya kemampuan untuk mengukur efektivitas program di seluruh desa. Hal ini mengakibatkan disparitas kesiapan antar desa dalam menghadapi bencana, yang berdampak langsung pada kemampuan masyarakat untuk merespons situasi darurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi DESTANA belum sepenuhnya merata, sehingga tidak semua desa memiliki tingkat kesiapan yang sama. Ketidakseimbangan ini mencerminkan perlunya peningkatan alokasi sumber daya dan fokus yang lebih besar pada sosialisasi di desa-desa yang masih tertinggal. Masalah ini menjadi tantangan utama dalam memastikan bahwa program DESTANA dapat mencapai tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana di semua wilayah.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat masih rendah. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar warga belum memahami langkah-langkah dasar tanggap darurat. Observasi menguatkan hal ini, di mana tingkat kehadiran dalam kegiatan pelatihan dan simulasi bencana relatif rendah. Dokumentasi menunjukkan bahwa empat desa yang aktif melakukan simulasi memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang risiko bencana dibandingkan desa lainnya.

Kesiapsiagaan masyarakat yang rendah dapat dikaitkan dengan minimnya pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan. Desa-desa yang tidak mendapatkan pelatihan memadai cenderung kurang tanggap terhadap risiko bencana. Rendahnya tingkat kehadiran dalam kegiatan simulasi juga menjadi indikator bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya persiapan menghadapi bencana.

Relasi antara kesiapsiagaan masyarakat yang rendah dengan keterbatasan pelatihan menunjukkan bahwa keberhasilan program DESTANA sangat bergantung pada intensitas dan kualitas pelatihan serta sosialisasi.

Tantangan ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan program DESTANA agar dapat meningkatkan kesiapan masyarakat di semua desa.

Diskusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program DESTANA di Kabupaten Lamandau belum optimal, dengan sejumlah kendala utama seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar-*stakeholder*, dan minimnya *monitoring* serta evaluasi. Pelaksanaan program juga belum merata, terlihat dari perbedaan intensitas pelatihan dan simulasi antar desa. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelatihan dan minimnya fasilitas tanggap darurat semakin memperkuat kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. Meski demikian, desa-desa yang telah mendapatkan pelatihan dan simulasi menunjukkan tingkat kesiapsiagaan yang lebih tinggi dibanding desa lainnya.

Temuan penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan koordinasi lintas sektor dalam keberhasilan program pengurangan risiko bencana. Sebagai contoh, penelitian oleh ([Makhfud & Mursyidah, 2024](#)) menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Namun, penelitian ini memiliki keunggulan karena tidak hanya memotret persoalan partisipasi, tetapi juga menyoroti aspek distribusi sumber daya dan efektivitas kebijakan yang belum banyak diangkat dalam konteks lokal seperti Kabupaten Lamandau. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi unik pada literatur tentang pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas program DESTANA bukan hanya soal pelaksanaan teknis, tetapi juga terkait dengan keadilan alokasi sumber daya,

komunikasi antar-*stakeholder*, dan pendekatan berkelanjutan. Refleksi ini menunjukkan bahwa program DESTANA dapat berfungsi sebagai katalis untuk membangun budaya kesiapsiagaan jika implementasinya dilakukan secara lebih strategis dan inklusif. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan penting bagi para pemangku kepentingan tentang kebutuhan untuk memprioritaskan kolaborasi dan pendekatan berbasis komunitas dalam menghadapi bencana di daerah pedesaan ([Adriani et al., 2024](#); [Mahbubah et al., 2021](#)).

Implikasi utama dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan efektivitas kebijakan pengelolaan bencana melalui pendekatan yang lebih adaptif dan holistik. Temuan ini relevan tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional yang ingin memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Penelitian ini juga menyoroti kebutuhan untuk merancang sistem *monitoring* dan evaluasi yang lebih sistematis, sehingga pelaksanaan program dapat diukur dan diperbaiki secara berkelanjutan. Dengan memperhatikan temuan ini, program DESTANA dapat menjadi model yang lebih relevan bagi wilayah lain dengan karakteristik serupa ([Palliyaguru et al., 2014](#); [Won et al., 2015](#)).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas implementasi program DESTANA disebabkan oleh beberapa faktor struktural dan teknis. Keterbatasan anggaran menjadi akar masalah yang memengaruhi berbagai aspek, mulai dari kurangnya pelatihan hingga minimnya fasilitas tanggap darurat. Selain itu, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan menghambat sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaannya. Faktor lain adalah lemahnya *monitoring* dan evaluasi, yang mengakibatkan rendahnya penyesuaian program terhadap kebutuhan spesifik masyarakat di berbagai desa. Ketidakseimbangan ini memperlihatkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program belum sepenuhnya berbasis data dan

kebutuhan lokal ([Juliswara et al., 2022b](#); [Permana & Rahman, 2023](#)).

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa langkah strategis perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas program DESTANA. Pertama, alokasi anggaran harus dirancang lebih merata dan berbasis kebutuhan spesifik setiap desa. Kedua, pelatihan dan simulasi bencana harus dilaksanakan secara lebih intensif dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif. Ketiga, koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan melalui pembentukan tim kerja terpadu yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Keempat, *monitoring* dan evaluasi harus dijadikan prioritas dengan menetapkan indikator keberhasilan yang terukur dan melibatkan pihak independen untuk mengevaluasi dampaknya. Langkah-langkah ini akan memastikan program DESTANA lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini secara mengejutkan mengungkap bahwa program DESTANA di Kabupaten Lamandau, yang dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, masih jauh dari optimal dalam pelaksanaannya. Salah satu temuan yang paling mengejutkan adalah bahwa meskipun beberapa desa telah menjalankan simulasi tanggap darurat, terdapat kesenjangan mencolok dalam distribusi anggaran dan pelaksanaan pelatihan, sehingga hanya separuh dari desa yang mendapatkan manfaat program secara maksimal. Rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya koordinasi antar-*stakeholder* semakin menegaskan bahwa tujuan program untuk menciptakan kesiapsiagaan yang merata belum tercapai.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori dan praktik pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik

yang mempertimbangkan keadilan dalam alokasi sumber daya dan pelibatan masyarakat dalam kebijakan pengurangan risiko bencana. Secara praktis, penelitian ini menawarkan wawasan yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan untuk merancang intervensi yang lebih strategis dan berbasis kebutuhan lokal. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya relevan bagi wilayah penelitian, tetapi juga dapat menjadi model untuk diterapkan di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi program DESTANA di Kabupaten Lamandau, lingkup penelitian yang terbatas pada delapan desa memberikan ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian atau menggunakan metode longitudinal untuk mengamati perubahan kesiapsiagaan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program tanggap darurat. Dengan arahan ini, diharapkan penelitian mendatang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai strategi pengurangan risiko bencana yang efektif dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, S. W., Susilo, C., Pandari, I., & Kurniansyah, H. A. A. (2024). Simulasi Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Bencana Banjir pada Masyarakat di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Journal of Community Development*, 5(2), 190–198. <https://doi.org/10.47134/comdev.v5i2.262>
- Aquarini, A. (2020). PENGARUH KEBIJAKAN POLITIK TERHADAP KEPATUHAN PHYSICAL DISTANCING MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19. *Anterior Jurnal*, 19(2), 66–73.

- <https://doi.org/10.33084/anterior.v19i2.1498>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed. Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dayak News. (2024). Banjir Melanda Kabupaten Lamandau, Puluhan Rumah dan Fasilitas Umum Terdampak. <https://dayaknews.com/lamandau/banjir-melanda-kabupaten-lamandau-puluhan-rumah-dan-fasilitas-umum-terdampak/>
- De Sisto, M., Shearing, C., Heffernan, T., & Sanderson, D. (2024). Reshaping disaster management: An integrated community-led approach. *Australian Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12668>
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAN METER DAN VAN HORN DALAM TINJAUAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN (RING ROAD) DI KABUPATEN TUBAN. *Journal Publicuho*, 4(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Iskandar, J., Salamah, U., & Patonah, N. (2018). Policy Implementation in Realizing the Effectiveness of Disaster Management. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(2.29), 548. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.29.13815>
- John Twigg. (2009). Characteristics of a disaster-resilient community: A guidance note. DFID Disaster Risk Reduction Interagency Coordination Group. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1346086/1/1346086.pdf>
- Juliswara, V., Manik, R. R., & Karnadjaja, D. (2022a). Implementasi Kebijakan Publik tentang Model Pengurangan Resiko Bencana dengan Pendekatan Pada Masyarakat Dalam Program Desa Tahan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 2(2), 118–138. <https://doi.org/10.47431/jmd.v2i2.275>
- Juliswara, V., Manik, R. R., & Karnadjaja, D. (2022b). Implementasi Kebijakan Publik tentang Model Pengurangan Resiko Bencana dengan Pendekatan Pada Masyarakat Dalam Program Desa Tahan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 2(2), 118–138. <https://doi.org/10.47431/jmd.v2i2.275>
- Kalteng Pos. (2024). Lamandau Siaga Banjir, Ketinggian Air Capai 2 Meter. <https://kaltengpos.jawapos.com/berita-utama/05/06/2024/lamandau-siaga-banjir-ketinggian-air-capai-2-meter/>
- Kompas.id. (2020). Banjir di Kabupaten Lamandau Meluas. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/09/09/banjir-di-kabupaten-lamandau-meluas>
- Lestari, A. F., Arso, S. P., & Jati, S. P. (2024). Implementation of the Integrated Emergency Response System: Systematic Review. *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 4(4), 1598–1613. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v4i4.14303>
- Mahbubah, N. L., Rizki, M. F., & Atthahara, H. (2021). Community Development as Disaster Risk Reduction Efforts through the Disaster Resilient Village (Destana) Program in Nganjuk Regency. *Journal of Local Government Issues*, 4(1), 60–76. <https://doi.org/10.22219/logos.v4i1.13116>
- Makhfud, & Mursyidah, L. (2024). Community Participation in Flood Disaster Management. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(4). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1176>
- Palliyaguru, R., Amaratunga, D., & Baldry, D. (2014). Constructing a holistic approach to disaster risk reduction: the significance of focusing on vulnerability reduction. *Disasters*, 38(1), 45–61. <https://doi.org/10.1111/disa.12031>
- Paripurno, E. T., Mahojwala, G., Putra, W., Sulistiyowati, I., Widi, M. W., Sukiyani, Nugroho, A. R. B., & Martono, B. (2024). Urgency of disaster resilient village-geosite program: unveiling the critical need for strengthening connections between geosites and village communities. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1314(1), 012033. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1314/1/012033>
- Permana, M. W., & Rahman, N. E. (2023). PENANGANAN BENCCANA BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PROGRAM

DESA TANGGUH BENCANA DI DESA GARON KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN. Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 9(2), 276–286. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v9i2.9940>

- Ryan, B., Johnston, K. A., Taylor, M., & McAndrew, R. (2020). Community engagement for disaster preparedness: A systematic literature review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 49, 101655. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101655>
- Sayuti, R. H., Inderasari, O. P., & Evendi, A. (2021). The Influence of Education and Local Culture on Community Preparedness in Facing Disasters. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: E-Saintika*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.36312/e-saintika.v5i1.381>
- Sunarto, S., Heru Santoso Wahito Nugroho, Suparji, Nani Surtinah, Verlingga Diah Oktiasa Putri, & Sausan Hanifah Setyowati. (2024). Collaboration with the Disaster Resilient Village Forum in Disaster Emergency Response Simulation in Ngelang Kartoharjo Village Magetan. *Frontiers in Community Service and Empowerment*, 3(2). <https://doi.org/10.35882/ficse.v3i2.65>
- Won, D., Yoo, S., Yoo, H., & Lim, J. (2015). Complex adaptive systems approach to sewol ferry disaster in Korea. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 1(2), 1–18. <https://doi.org/10.1186/s40852-015-0023-7>
- Yuliani, H., Ayuh, E. T., & Karina, M. E. (2024). Strategi Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam Program Desa Tangguh Bencana. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 5(2), 37383. <https://doi.org/10.31539/joppas.v5i2.10441>